

2. Pentahapan (1/5)

| | Fase 1 2009-2010 | Fase 2 2011-2012 | Fase 3 2013-2015 |
|----------------------------|---|--|---|
| Tahapan | Pemantapan | Layanan Terhubung | Layanan Terintegrasi |
| Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> Perumusan dan Penetapan Kebijakan Nasional Standar Kelembagaan | <ul style="list-style-type: none"> Penerapan Kelembagaan | |
| Sistem dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi ke Instansi Pusat dan Daerah Pengkajian SOP yang ada Perumusan SOP baru Sosialisasi SOP baru Penerapan Standar | <ul style="list-style-type: none"> Penerapan SOP Evaluasi Penerapan SOP | |
| Tata Kelola TI | | | |
| Infrastruktur | <ul style="list-style-type: none"> Pusat Data Instansi Pusat Pusat Data Instansi Daerah (Pilot) Jaringan Komunikasi Data Instansi Pusat Jaringan Komunikasi Data Daerah (Pilot) | <ul style="list-style-type: none"> Pusat Data Nasional Pusat Data Instansi Seluruh Daerah Jaringan Komunikasi Data Antar K/L Jaringan Komunikasi Data Seluruh Daerah | <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Komunikasi Data Nasional |
| Aplikasi dan Data | <ul style="list-style-type: none"> Aplikasi Dasar Aplikasi Standar Nasional (Pilot) Aplikasi Prioritas (Pilot) Pembangunan Data Nasional | <ul style="list-style-type: none"> Aplikasi Standar Nasional Terhubung Penerapan Aplikasi Prioritas di Seluruh Daerah | <ul style="list-style-type: none"> Aplikasi Standar Nasional Terintegrasi Aplikasi Prioritas Terintegrasi |
| Sumber Daya Manusia | <ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi SDM TIK Standar Kompetensi SDM TIK Pengembangan Kurikulum SDM TIK | <ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Penerapan e-Learning | |
| Pelatihan | | | |

10

2. Pentahapan (2/5)

Aplikasi Dasar Pemerintahan

- Keuangan Daerah
- Kepegawaian (berbasis web dengan modul layanan online untuk PNS)
- Layanan Kependudukan (KTP online, Kartu Keluarga)
- Perijinan Pemerintah Daerah (SIUP dan ijin lain)
- Manajemen Bencana (Mitigasi, Tanggap Darurat Banjir dan Bencana Lain)
- Pengendalian Proyek (berbasis web, online, perencanaan, pemantauan, pelaporan)
- Interaksi Masyarakat (kehumasan, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat)
- Pengadaan Barang dan Jasa

Catatan: memerlukan koordinasi dengan instansi terkait bidang aplikasi

11

2. Pentahapan (3/5)

Aplikasi Standar Nasional

- Kepegawaian (BKN)
- e-Kesehatan (DepKes)
- e-Pariwisata (DepParBud)
- ...



12

2. Pentahapan (4/5)

Prioritas

- NSW
- e-Pengadaan
- NIN
- e-Anggaran
- e-Pendidikan
- ...



13

2. Pentahapan (5/5)

Infrastruktur

- Pusat Data Nasional
- Pusat Data Instansi Pusat
- Pusat Data Instansi Daerah
- Jaringan Komunikasi Data Nasional
- Jaringan Komunikasi Data Instansi Pusat
- Jaringan Komunikasi Data Instansi Daerah
- Regional e-Gov Network Exchange

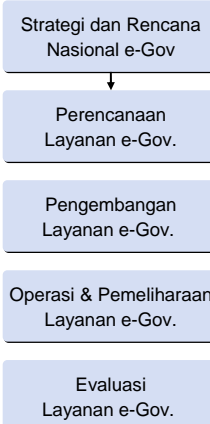


14

3. Kepemimpinan dan Organisasi

Strategi Implementasi

Aktivitas Pelaksanaan e-Gov



KOMINFO

KOMINFO



Segmentasi

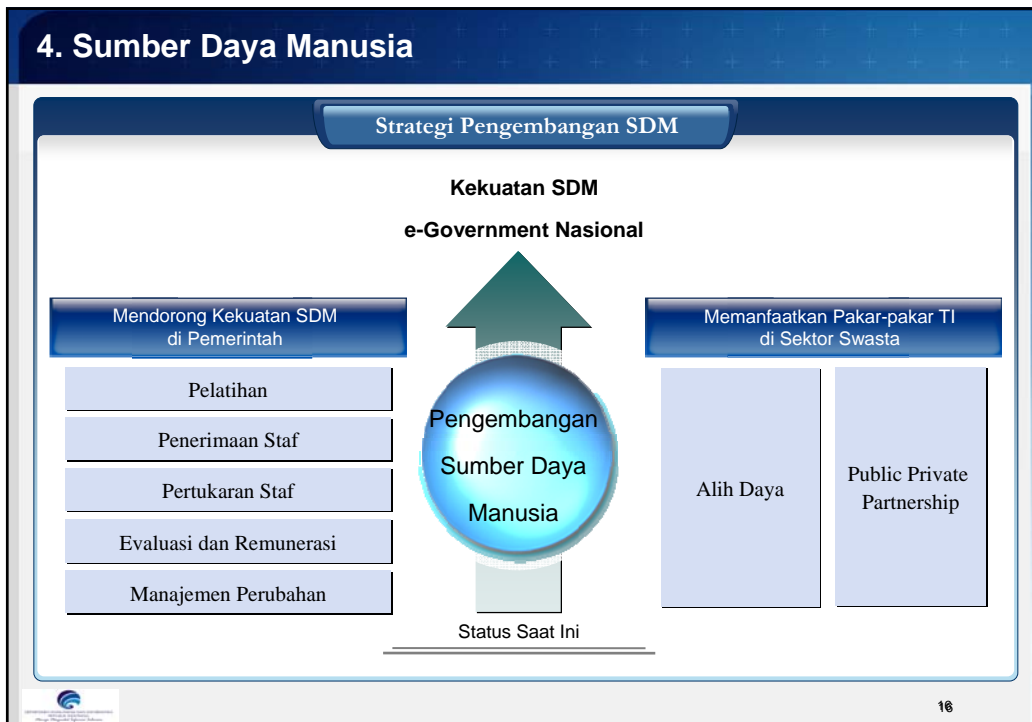
Kelompok

| Kelompok | Fokus | Penanggung Jawab |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Program Kunci Di Tingkat Nasional | <ul style="list-style-type: none"> • kepentingan nasional • perlu dibangun segera • digunakan secara umum di seluruh instansi • Infrastruktur nasional • Terhubung atau terintegrasi dengan layanan-layanan e-Gov lainnya | KOMINFO dan instansi terkait lainnya |
| Program Pusat | <ul style="list-style-type: none"> • Layanan e-Gov untuk kegiatan pemerintahan di tingkat pusat | Pemerintah Pusat |
| Program Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Layanan e-Gov untuk kegiatan pemerintahan di tingkat daerah yang terpadu dengan program pemerintah pusat | Pemerintah Daerah |



15

4. Sumber Daya Manusia



5. Hukum dan Peraturan

